

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Firda Silvia Pramashela¹ Hadiyanto Abdul Rachim²

¹Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Padjadjaran

²Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

firda17001@mail.unpad.ac.id¹, hadiyantorachim@unpad.ac.id²

Submitted : 29 Mei 2021, Accepted : 6 Februari 2022, Published : 8 Februari 2022

ABSTRAK

Umumnya penyandang disabilitas masih memiliki stigma negative untuk beberapa masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas juga memiliki kesetaraan hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, salah satunya hak mendapatkan pelayanan public. Dengan adanya Pasal 19 mengenai hak pelayanan public, seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. Namun masih banyak fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesibilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh kota di Indonesia masih belum optimal dalam aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: pelayanan public, disabilitas, hak, Indonesia

ABSTRACT

Generally, people with disabilities still have a negative stigma for some Indonesians. Persons with disabilities also have the same rights as other Indonesian citizens, one of which is the right to get public services. With the existence of Article 19 regarding the right to public services, persons with disabilities should have the right to optimal, fair, dignified public services without discrimination. However, there are still many public facilities provided by the government that do not support the accessibility of public services for persons with disabilities. Therefore, it is important to conduct a study on the accessibility of public services specifically for persons with disabilities in various cities in Indonesia. The method used is a qualitative approach through literature study. The results showed that out of ten cities in Indonesia, the accessibility of public services for persons with disabilities is still not optimal.

Keywords: public services, disability, rights, Indonesia

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan segala hak oleh karena kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia, adapun hak ini wajib diberikan tanpa membedakan kondisi fisik individunya. Hak asasi hakikatnya bersifat universal yang artinya hak-hak ini diberikan kepada semua orang tanpa ada keterbatasan pada jenis kelamin, warna kulit, usia, kultural, dan juga agama. Hak ini melampaui batas-batas negara, perekonomian, gender dan keadaan seseorang baik itu normal

maupun penyandang disabilitas¹

Disabilitas adalah keterbatasan atau ketidakmampuan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara dan ukuran yang lazim dianggap normal bagi manusia pada umumnya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya gangguan atau penurunan kemampuan individu tersebut² Disabilitas mencakup orang-orang dengan kekurangan fisik maupun psikis yang ada dalam masyarakat. Maka penyebutan orang-orang disabilitas dapat lebih familiar dengan menyebut dengan difabel. Dengan adanya predikat difabel, maka masyarakat dengan mudahnya membagi strata sosialnya dengan diri

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

“orang normal” dibandingkan dengan “orang cacat/difabel”³

Jumlah penyandang disabilitas semakin meningkat dan semakin membutuhkan perhatian pemerintah mengenai kebutuhan dalam segala aspek kehidupannya seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan kebahagiaan dan kebutuhan lain termasuk untuk dipandang sama dengan masyarakat biasa¹

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya⁴

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam bentuk barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban Pelayanan publik terbagi menjadi tiga bagian yaitu pelayanan administratif yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat dan pelayanan barang yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat⁴

Namun masih banyak ditemukan bahwa fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian ini karna tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan public terutama dalam akomodasi bagi penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka,

bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siapa pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Difabel di Indonesia

Data statistik menunjukkan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11,580,117 orang, di antaranya 3,474,035 (disabilitas penglihatan), 3,010,830 (disabilitas fisik), 2,547,626 (disabilitas pendengaran), 1,389,614 disabilitas mental) and 1,158,012 (disabilitas kronis). Sementara menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah: 7,126,409 orang.

Pelaksanaan Aksesibilitas Pelayanan Publik

Aksesibilitas bagi disabilitas diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah disabilitas³ Aksesibilitas yang dimaksud yaitu kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan diberikan khusus untuk para penyandang disabilitas sebagai upaya pencapaian kesamaan dengan masyarakat pada umumnya pada berbagai aspek kehidupan⁶ Pemerintah sebagai penyedia layanan utama harus mampu memenuhi hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Berikut pelaksanaan aksesibilitas pelayanan public pada beberapa kota di Indonesia:

1. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Tegal

Berdasarkan data pendataan difabel LBK-DSM Kabupaten Tegal tahun 2015 jumlah difabel ada 134 jiwa. Pada bidang pendidikan difabel yang menempuh sekolah formal tetapi tidak

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

menamatkan pendidikannya, seperti tidak lulus SD. Pada bidang kesehatan, dari beberapa tempat kesehatan yaitu rumah sakit negeri dan swasta di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari

fasilitas fisiknya. Jalur jalan yang dibuat di rumah sakit sudah ramah difabel karena memang dikondisikan bagi keadaan pasien. Fasilitas fisik sudah memadai bagi keberadaan difabel³

No.	Kota	Jumlah Disabilitas	Pelaksanaan Aksesibilitas	Sumber
1.	Tegal	134 jiwa	Pada bidang pendidikan difabel yang menempuh sekolah formal tetapi tidak menamatkan pendidikannya, seperti tidak lulus SD. Pada bidang kesehatan, dari beberapa tempat kesehatan yaitu rumah sakit negeri dan swasta di Kabupaten Tegal dapat dilihat dari fasilitas fisiknya. Jalur jalan yang dibuat di rumah sakit sudah ramah difabel karena memang dikondisikan bagi keadaan pasien. Fasilitas fisik sudah memadai bagi keberadaan difabel	³
2.	Garut	5.587 jiwa	Penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bagi disabilitas masih mengalami berbagai kendala, diantaranya masih kurangnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pada penyelenggara pelayanan, masih kurangnya aksesibilitas dan masih terbatasnya tenaga profesional yang dapat mendukung penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan public	⁶
3.	Banda Aceh	449 orang	Pelayanan public di Rumah Sakit, sudah banyak rumah sakit di Banda Aceh yang menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti <i>ramp</i> (tangga landai) dan lift khusus. Pelayanan public dalam bidang transportasi, penyandang disabilitas dapat kemudahan mengakses dengan menggunakan kursi roda.	⁴
4.	Pekanbaru	1.032 penderita disabilitas	Data tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 1.032 penderita disabilitas berada di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Sampai sejauh ini komitmen dan kepedulian pemangku kepentingan untuk melayani sebaik mungkin bagi penyandang disabilitas nyatanya belum terwujud di kota Pekanbaru. Terbukti dari pembangunan halte/shelter bus yang sama sekali belum ada akses jalan yang landau dan datar yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum terselenggara baik,	⁷

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

5.	Padang	2.070 penderita	Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang terhadap fasilitas publik yang dinilai belum ramah disabilitas seperti jalan trotoar yang dibuat belum memahami tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya penghalang berupa tonggak reklame, tiang listrik, kendaraan yang parkir liar pada jalur jalan yang dilalui penyandang disabilitas, sehingga ini menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan public	8
6.	DKI Jakarta	14.459 jiwa	Aksesibilitas fasilitas pada transportasi public, beberapa fasilitas aksesibilitasnya telah tersedia cukup memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Namun, pada fasilitas bangunan umum dan fasilitas kesehatan masih belum optimal.	9
7.	Malang	135.000	Secara keseluruhan diketahui bahwa umumnya fasilitas umum di kota malang 72 % tidak aksesibel, 24 % aksesibel dan 0 % aksesibel sesuai dengan standard peraturan yang ada. Dengan demikian peraturan pemerintah perihal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat jauh terimplementasi dengan baik. Dengan demikian penyandang disabilitas belum dipenuhi haknya dalam mengakses fasilitas publik.	10
8.	Bandung	5359 orang	Mobilitas dan aksesibilitas pelayanan publik pun perlu untuk dibenahi, mengingat penyandang disabilitas di Kota Bandung seringkali mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam kota karena fasilitas publik yang tidak ramah terhadap disabilitas	11
9.	Yogyakarta	3353 orang	Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum, selama ini kaum difabel masih mengalami kesulitan dalam mengakses bangunan dan prasarana fisik yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, ketika memasuki Komplek Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, bagian Hubungan Masyarakat misalnya, para difabel berkursi roda tampak kesulitan ketika harus menaiki tangga tanpa ada jalur khusus kursi roda. Hanya pada sejumlah kecil fasilitas publik, seperti Hotel Quality dan Puskesmas II Umbulharjo Kota Yogyakarta, telah aksesibel bagi kaum difabel dengan tersedianya jalan landai	12

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

			sebagai jalur khusus bagi pengguna kursi roda serta toilet khusus difabel	
10.	Surakarta	1104 orang	Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas public di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta	13

Fasilitas publik yang tersedia seperti transportasi umum sudah menjangkau sampai di depan komplek pasar. Sarana fisik dari pasar seperti jalur khusus difabel tidak ada. Respon masyarakat di pasar terhadap keberadaan difabel tidak baik. Namun masjid-masjid di Kabupaten Tegal memiliki ruang yang cukup ramah difabel³. Di kota Tegal, pelaksanaan aksesibilitas pelayanan public dianggap ramah terhadap penyandang disabilitas.

2. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Garut

Berdasarkan data, bahwa jenis disabilitas yang termasuk kategori tertingi di Garut adalah retardasi sebesar 1.787 atau 31.98%, kemudian penggunaan kaki sebesar 1.269 atau 22.71% dan bicara sebesar 1.001 atau 17.92%. Sedangkan jenis disabilitas terendah adalah *light perception* sebesar 52 atau 0.93%. Dengan jumlah total sebesar 5.587 jiwa⁶.

Di Kabupaten Garut, penyelenggaraan pelayanan publik khususnya bagi disabilitas masih mengalami berbagai kendala, diantaranya masih kurangnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pada penyelenggara pelayanan, masih kurangnya aksesibilitas dan masih terbatasnya tenaga profesional yang dapat mendukung penyandang disabilitas dalam menerima pelayanan public⁶.

3. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Banda Aceh

Di Kota Banda Aceh terdapat 449 orang penyandang disabilitas yang telah diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banda Aceh. Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari tuna netra, tuna daksa, tuna wicara, tuna rungu wicara, cacat mental motorik, tuna daksa/metal motorik, autisme dan lainnya⁴.

Pelayanan public di Rumah Sakit, sudah banyak rumah sakit di Banda Aceh yang menyediakan pelayanan bagi penyandang disabilitas seperti fasilitas diantaranya terdapat *ramp* (tangga landai) yang dapat digunakan bagi pasien penyandang tuna daksa dan tuna netra, terdapat lift khusus yang disediakan bagi pasien biasa, lansia dan pasien penyandang disabilitas. Beberapa ruangan juga telah menyediakan toilet

yang mempunyai pegangan rambat untuk memudahkan pasien penyandang disabilitas dan lansia. Pelayanan public dalam bidang transportasi, penyandang disabilitas dapat kemudahan mengakses dengan menggunakan kursi roda. Ramp yang disediakan pada halte cukup landai sehingga dapat digunakan tanpa bantuan orang lain, dan di setiap sisi terdapat pembatas sehingga dapat digunakan tanpa takut terjatuh⁴.

4. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Pekanbaru

Data tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 1.032 penderita disabilitas berada di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Sampai sejauh ini komitmen dan kepedulian pemangku kepentingan untuk melayani sebaik mungkin bagi penyandang disabilitas nyatanya belum terwujud di kota Pekanbaru. Terbukti dari pembangunan halte/shelter bus yang sama sekali belum ada akses jalan yang landai dan datar yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum terselenggara baik⁷.

5. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Padang

Data pada tahun 2017 menunjukkan masih ada 2.070 penyandang disabilitas di kota Padang. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang terhadap fasilitas publik yang dinilai belum ramah disabilitas seperti jalan trotoar yang dibuat belum memahami tentang kebutuhan penyandang disabilitas. Adanya penghalang berupa tonggak reklame, tiang listrik, kendaraan yang parkir liar pada jalur jalan yang dilalui penyandang disabilitas, sehingga ini menyulitkan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan public⁸.

6. Aksesibilitas Pelayanan Publik di DKI Jakarta

Jumlah penyandang disabilitas tahun 2019 di DKI Jakarta yaitu 14.459 jiwa. Dengan komposisi wilayah penyandang disabilitas terbesar yaitu Jakarta Barat sejumlah 4.397 jiwa, sejumlah 4.038 jiwa di Jakarta Timur, sejumlah 2.790 jiwa di Jakarta Selatan, sejumlah 1.468 jiwa di Jakarta

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

Utara, sejumlah 1.463 jiwa di Jakarta Pusat dan sejumlah 6 jiwa di Kepulauan Seribu. Aksesibilitas fasilitas pada transportasi public, beberapa fasilitas aksesibilitasnya telah tersedia adalah tersedianya *guiding block*, *ramp*, pintu yang lebar di lokasi tiket dan kereta sehingga mudah dilewati oleh pengguna kursi roda, adanya kursi roda didalam MRT, elevator dan lift khusus disabilitas, layar informasi dan tanda khusus sebagai penumpang prioritas⁹

Aksesibilitas pada bangunan umum, tidak ditemukannya fasilitas dasar seperti *guiding block*, *ramp*/ *handrail*, *running text*. Fasilitas lainnya seperti parkir tersedia namun tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda karena tidak ada *ramp* di kanan kiri tempat menurunkan penumpang. Pada fasilitas kesehatan, loket pendaftaran untuk pemanggilan antrian melalui *speaker*, tidak ada layar informasi pemanggilan nomor antrian. *Guiding block* juga tidak terlihat terpasang, terdapat *ramp* dan fasilitas toilet tidak mendukung aksesibilitas⁹

7. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Malang

Di Malang terdapat sekitar 135.000 penyandang disabilitas dari penduduk Malang yang mencapai 894.653 jiwa pada tahun 2012. Hasil survey terhadap 125 tempat fasilitas publik misalnya, 85 % tidak mempunyai ramp kursi roda, dan jika ada mereka tidak aksesibel. Data menunjukkan bahwa 83,00 % fasilitas public tidak aksesibel karena tidak menyediakan toilet bagi penyandang disabilitas. Hanya 17 % yang menyediakan, itupun tidak sesuai standard. Jadi penyandang disabilitas akan kesulitan untuk buang hajat jika bepergian ke tempat umum¹⁰

Fasilitas yang cukup penting lainnya yang sering dilupakan adalah *guiding block* buat penyandang tuna netra. Dari 125 tempat yang dikategorikan sebagai tempat publik, 97% tidak memasang guiding block dan hanya 3% yang memasang fasilitas ini. Fasilitas tempat ibadah, 75 % dari survey menunjukkan bahwa fasilitas public dalam bentuk tempat ibadah tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan 25 % dari tempat ibadah tersebut kurang aksesibel¹⁰

Adapun secara keseluruhan sebagaimana bisa dilihat pada data di atas, diketahui bahwa umumnya fasilitas umum di kota Malang 72 % tidak aksesibel, 24 % aksesibel dan 0 % aksesibel sesuai dengan standard peraturan yang ada. Dengan demikian peraturan pemerintah perihal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat jauh terimplementasi dengan baik. Dengan demikian penyandang disabilitas belum dipenuhi haknya dalam mengakses fasilitas publik¹⁰

8. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Bandung

Disabilitas di Kota Bandung dapat dilihat dari jumlah penyandang disabilitas yang terus mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2015 sebanyak 4123 hingga akhir tahun 2017 mencapai 5359 orang¹¹

Melihat kondisi transportasi umum di Kota Bandung, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Dalam hal ini pemerintah sudah menyediakan layanan transportasi umum seperti Damri dan Trans Metro Bandung. Di dalamnya pun sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas. Namun, terkait kemiringan trotoar memang masih ada trotoar yang tidak memberikan sudut elevasi untuk dapat dilalui oleh kursi roda. Hal ini pun menyulitkan bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda¹¹

Mobilitas dan aksesibilitas pelayanan publik pun perlu untuk dibenahi, mengingat penyandang disabilitas di Kota Bandung seringkali mengalami kesulitan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam kota karena fasilitas publik yang tidak ramah terhadap disabilitas¹¹

9. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Yogyakarta

Jumlah difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2011 adalah 35. 264 orang, dan untuk Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 3.353 orang atau sekitar 9. 51 % dari total jumlah kelompok berkebutuhan khusus di DIY¹²

Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum, selama ini kaum difabel masih mengalami kesulitan dalam mengakses bangunan dan prasarana fisik yang ada di Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, ketika memasuki Komplek Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta, bagian Hubungan Masyarakat misalnya, para difabel berkursi roda tampak kesulitan ketika harus menaiki tangga tanpa ada jalur khusus kursi roda. Hanya pada sejumlah kecil fasilitas publik, seperti Hotel Quality dan Puskesmas II Umbulharjo Kota Yogyakarta, telah aksesibel bagi kaum difabel dengan tersedianya jalan landai sebagai jalur khusus bagi pengguna kursi roda serta toilet khusus difabel¹²

10. Aksesibilitas Pelayanan Publik di Surakarta

Jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2015 meliputi jumlah penyandang disabilitas fisik sebanyak 691 orang dengan rincian tuna daksa sebanyak 425 orang, tuna mata sebanyak 425 orang, dan bisu tuli sebanyak 135 orang. Jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 291 orang dengan rincian tuna grahita sebanyak 145 orang, tuna laras sebanyak 146. Jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

(ganda) sebanyak 122 orang. Total penyandang disabilitas di Surakarta pada tahun 2015 adalah 1104 orang¹³

Aksesibilitas angkutan umum, dari 151 halte BST di Kota Surakarta hanya 26 halte yang memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas yaitu adanya *ramp* dan *guiding block*. Aksesibilitas bangunan umum, bahwa jalur khusus tersebut masih terlalu curam untuk dilalui oleh penyandang disabilitas. Kemudian untuk fasilitas *skybridge* sisi terminal dirasa belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan menuju ruang tunggu terminal setelah keluar dari *skybridge*. Aksesibilitas jalanan umum, kebanyakan trotoar di Kota Surakarta tidak menyediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas yaitu *ramp*. Namun sangat disayangkan kondisi *guiding block* yang ada di Kota Surakarta tidak memenuhi indikator fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas¹³

Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas public di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta¹³

KESIMPULAN

Dari data kesepuluh kota yang merupakan representative dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah di dapatkan bahwa dari 10 kota yang menjadi representative hanya 2 kota yang sudah optimal dalam pelaksanaan aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas yaitu kota Tegal dan Banda Aceh. Namun, untuk 8 kota lainnya masih belum mengoptimalkan pelayanan public bagi penyandang disabilitas.

SARAN

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan umum. Pemerintah diwajibkan menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Namun pada kenyataannya masih minimnya pelayanan khusus dan fasilitas khusus yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas pada pelayanan rumah sakit dan pada sarana transportasi yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Yuliana, Yeni. (2019). Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Jasa Angkutan Udara. *Jurnal Nusantara*. Vol 6 (3) : 536-547.
- (2) WHO. (2011). World Report on Disability. Switzerland: World Health Organization.
- (3) Mumpuni, Sesya Dias, Arif Zainudin. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*. Vol 1(2): 133-138.
- (4) Nilda Mutia, Yanis Rinaldi. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*. Vol 1(1): 55-66.
- (5) Zed, Mustika. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- (6) Pasciana, Roestiana. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kabupaten Garut). *Jurnal Sawala Administrasi Negara*. Vol 8(2): 194-204.
- (7) Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini. (2018). Kualitas Pelayanan Publik bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 9(1): 11-18.
- (8) Besse Fatmawati, Naldi Gantika, Zennis Helen. (2018). Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *UNES Journal of Social and Economics Research (UJSER)*. Vol. 3(2): 170-177.
- (9) Jane Kartika Propiona. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol 10 : 1-18.
- (10) Slamet Thohari. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol 1(1): 27-37.
- (11) Joni Dawud, Siti Widharetno Mursalim, Endah Tri Anomsari, Nur Imam Taufik. Strategi Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang Disabilitas: Sebuah Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 25(2): 141-159.
- (12) Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Socia*. Vol 10(2):108-119.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------

- (13) Lelly Nuraviva. (2017). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7(1): 1-1

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	e ISSN: 2620-3367	Vol. 4 No. 2	Hal : 225-232	Desember 2021
-----------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------